

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria*, (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004).
- Arie S. Hutagalung, *et.al.*, *Hukum Pertanahan Di Belanda Dan Indonesia*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).
- Bachtiar Effendi, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya*, (Bandung, 1983).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2007).
- Daus Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, (Alumni: Bandung, 2008).
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Gokkel. HRW dan Van der Wall, *Istilah Hukum Lain-Indonesia*, alih bahasa S. Adiwinata, (Jakarta: Intermedia, 1986).
- Gunanegara, “*Hukum Administrasi Negara, Jual Beli dan Pembebasan Tanah, Sejarah Pembentukan Hukum Pengadilan Tanah Indonesia*”, (Jakarta: Tata Nusa 2016)
- Gunanegara, “*Hukum Pidana Agraria: Logika Hukum Pemberian Hak Tanah Dan Ancaman Hukum Pidana*”, (Jakarta: Tatanusa, 2017),
- Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah Pemda, Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2004)
- Ilyas Ismail, *Konsepsi Hak Garap atas Tanah*, (Medan: Perdana Publishing, 2011)
- Imron Chumaidi, *Panduan Kepemilikan Tanah: Problematika Sertifikasi Tanah Secara Sporadik*, (Semarang: Lawwana, 2022).
- Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010).

- Dr.Irene Eka Sihombing, SH.,CN.,MH. *Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, (Jakarta, Universitas Trisakti 2021)
- Maria S.W. Sumardjono. *Kebijakan Tanah: Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2001).
- Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*, (Yogyakarta: Citra Media, 2007).
- Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum, Edisi Revisi*”, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Ritohardoyo, *Penggunaan dan Tata Guna Lahan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013),
- Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1990),
- Samsul Wahidin, *Hukum Sumber Daya Air*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).
- Sigit Sapto Nugroho dan I Wayan Kartika Jaya Utama, *Pokok-Pokok Hukum Agraria Indonesia*, (Klaten: Lakeisha, 2022).
- Soejono, Abdurrahman, *Prosedur Pendaftaran Tanah*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2003).
- Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Soerjono Soekanto, *et.al.*, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019)
- Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* , (Jakarta: Kencana, 2011)
- Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015).
- Waskito dan Hadi Arnowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Yandri, P, *Pengelolaan Situ/Rawa Di Indonesia: Isu Desentralisasi, Partisipasi Warga, Dan Instrumen Ekonomi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Tanah Situ, Danau, Embung dan Waduk.

### C. JURNAL

Agus Budianto, Shinta Pangesti, Debora Pasaribu, & Stephanie Faustina, “Barcoding Digital Signature Authenticity Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana”, *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2, April 2021

Audry Zefanya dan F.X. Arsin Lukman, “Tolak Ukur Pemenuhan Penguasaan Fisik Atas Tanah Melalui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah”, *Jurnal USM Law*, Vol. 5, No. 2, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4878>.

A. Pamudjipto dan W. Sutiono, “Pemanfaatan Air Danau Sebagai Sumber Air Untuk Irigasi”, *Jurnal Ina-Rxiv*, May 2018. DOI: [10.31227/osf.io/wy2uc](https://doi.org/10.31227/osf.io/wy2uc).

Dwi Heny Ratnawati dan Djauhari, “Pelaksanaan Akta Pelepasan Hak Sebagai Alas Hak Untuk Mengajukan Permohonan Peralihan Dan Perubahan Hak Guna Bangunan Yang Jangka Waktunya Telah Berakhir Di Kabupaten Brebes”, *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, Maret 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2554>.

Gunanegara, “Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebagai Alas Hak Pengurusan Hak Atas Tanah”, *Jurnal Law Review*, Vol. XXI, No. 3, Maret 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i3.4864>,

\_\_\_\_\_, “Pemberian Hak Atas Tanah Di Kawasan Lindung Menurut Surat Edaran ATR/BPN No. 4/2022 versus Undang-Undang Sektoral”, DOI: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.16277.60647>.

Hadi Arnowo “Pengamanan Situ, Danau, Embung Dan Waduk Sebagai Kekayaan Negara Melalui Pendaftaran Tanah”, *Jurnal Inovasi Aparatur*, Vol. 2, No. 2, 2020.

Muhammad Azil Maskur, “Kebijakan Pengelolaan Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Sumber Daya Air”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3, September 2019. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1634>.

Niken Ariska Handayani, *et.al.*, “Akibat Hukum Pendaftaran Tanah Pertama Kali Tanpa Alas Hak Yang Sah”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 3, 2019. DOI: <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.26001>.

Novita Dyah Kumala Sari dan Syafrudin Yudowibowo, “Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/Pa.Sgt)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 4, No. 3, 2016. DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v4i3.38773>.

Pitri Yandri, “Pengelolaan Situ/Rawa Di Indonesia: Isu Desentralisasi, Partisipasi Warga, Dan Instrumen Ekonomi”, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol. 11, No. 1, Maret 2015. DOI: <https://doi.org/10.33830/jom.v11i1.93.2015>.

Prasetyo Budie Yuwono, “Kajian Singkat Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terkait Amandemen Undang-Undang 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air”, Jurnal Kediklatan WidyaPraja, Vol. 1, No. 1, 2021. DOI: <https://doi.org/10.33830/jom.v11i1.93.2015>.

Wita Sari Peranginangin dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Belum Bersertifikat Melalui Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional”, Jurnal Widya Yuridika, Vol. 5, No. 1, Juni 2022. DOI: <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2493>.

#### **D. PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2018/PN.Tng.

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor Putusan Nomor: 60/Pdt/2019/PT.BTN.

#### **E. WAWANCARA DAN LAIN LAINYA**

Hasil Wawancara Hasil wawancara dengan Iwan Firmansyah, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, tanggal 4 Mei 2023, pukul 14.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Irul Tanjung Raman, Kepala Seksi Bapan, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, tanggal 2 Mei 2023, pukul 15.30 WIB.

SK Dekan Fakultas Hukum Nomor: 008/SKD/FH-UPH/VIII/2022, “Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Tesis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan”, (Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2022)